



Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Meunasah Mee Tahun Anggaran 2020-2023)

Amara Imanika¹, Annisa Nurfadillah Lubis², Afrizal Nurhasan³, Bambang Pamelga⁴,
Nurul Afni⁵, Syawal Hariant⁶

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: amaraimanika7@gmail.com¹, annisanurfadillah.101@gmail.com²,
ahmadnusul9345@gmail.com³, pamelgaputra0510@gmail.com⁴, nurulafni724@gmail.com⁵,
syawalhariant⁶@pnl.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 21, 2025

Accepted December 26, 2025

Keywords:

Budget Realization,
APBDes,
Effectiveness,
Village Government
Performance

ABSTRACT

The effectiveness of village government performance can be assessed through the realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), which reflects the government's capacity to implement planned programs and activities. This study aims to analyze budget realization as an indicator of the effectiveness of village government performance in Meunasah Mee Village during the 2020–2023 fiscal years. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach using secondary data in the form of APBDes budget realization reports. Data analysis is conducted by comparing budget targets and realizations, calculating effectiveness ratios, and examining expenditure composition across fiscal years. The results indicate that while revenue realization shows an effective to highly effective level, expenditure realization remains relatively uneven across sectors. Expenditures are dominated by routine government administration, whereas development and community empowerment expenditures are less optimally realized. This condition suggests that village government performance effectiveness has not been fully achieved from a development-oriented budgeting perspective. Strengthening budget planning quality, improving village officials' capacity, and enhancing budget supervision are necessary to improve the effectiveness of village financial management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 21, 2025

Accepted December 26, 2025

Kata Kunci:

Realisasi Anggaran,
APBDes,
Efektivitas,
Kinerja Pemerintah Desa

ABSTRACT

Efektivitas kinerja pemerintah desa dapat dinilai melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran sebagai indikator efektivitas kinerja pemerintah Desa Meunasah Mee selama tahun anggaran 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBDes. Analisis data dilakukan melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi, perhitungan rasio efektivitas, serta analisis struktur belanja desa antar tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, namun realisasi belanjamasih menunjukkan ketimpangan antar bidang. Belanja



penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tingkat realisasi tertinggi, sementara belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kinerja pemerintah desa belum sepenuhnya tercapai dalam perspektif pembangunan desa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Amara Imanika
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Email: amaraimanika7@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa secara mandiri.

Realisasi APBDes menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah desa. Tingkat kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan. Efektivitas pengelolaan APBDes tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kesesuaian alokasi belanja dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel Rasio Efektivitas Realisasi APBDes Desa Meunasah Mee
Tahun Anggaran 2020–2023**

Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas Pendapatan	Kriteria	Rasio Efektivitas Belanja	Kriteria
2020	98,7 %	Efektif	82,4 %	Cukup Efektif
2021	101,2 %	Sangat Efektif	85,6 %	Efektif
2022	99,4 %	Efektif	80,1 %	Cukup Efektif
2023	100,5 %	Sangat Efektif	87,9 %	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Meunasah Mee Tahun 2020–2023 (diolah)

Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Desa Meunasah Mee tahun anggaran 2020–2023, struktur pendapatan desa didominasi oleh pendapatan transfer, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong. Tingkat realisasi pendapatan desa secara umum berada pada kisaran di atas 90 persen, bahkan pada beberapa tahun anggaran tercatat melebihi 100 persen dari target anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa relatif mampu mengoptimalkan penerimaan dana transfer secara efektif.

Namun demikian, tingginya persentase realisasi pendapatan tidak sepenuhnya diikuti oleh realisasi belanja yang seimbang antar bidang. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa



menunjukkan tingkat realisasi tertinggi dengan persentase rata-rata antara 85 hingga 95 persen. Sebaliknya, realisasi belanja pelaksanaan pembangunan desa berada pada kisaran 60 hingga 80 persen, sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat menunjukkan tingkat realisasi terendah dengan persentase di bawah 60 persen.

Ketimpangan struktur realisasi belanja tersebut mengindikasikan bahwa orientasi penggunaan anggaran desa masih cenderung berfokus pada belanja rutin pemerintahan dibandingkan belanja produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis realisasi APBDes Desa Meunasah Mee selama periode 2020–2023 menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan berorientasi pada pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan desa yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran (Mardiasmo, 2018).

2. Teori Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, sedangkan realisasi yang rendah mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran (Halim & Kusufi, 2017).

3. Teori Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa

Efektivitas kinerja pemerintah desa berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat. Efektivitas tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat dan dampak belanja terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Mahmudi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian adalah Desa Meunasah Mee dengan periode pengamatan tahun anggaran 2020–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBDes yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi, menghitung rasio efektivitas realisasi pendapatan dan belanja, serta menganalisis komposisi belanja desa untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah desa secara sistematis dan komprehensif.



PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas realisasi pendapatan Desa Meunasah Mee selama periode 2020–2023 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terutama yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah.

Namun, rasio efektivitas belanja menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan rasio efektivitas pendapatan. Pada beberapa tahun anggaran, efektivitas belanja berada pada kategori cukup efektif, yang menandakan bahwa tidak seluruh anggaran belanja dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa.

Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan komponen belanja dengan tingkat realisasi tertinggi. Tingginya realisasi pada pos ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administratif dan operasional pemerintahan. Namun, dominasi belanja rutin berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi belanja pembangunan desa menunjukkan tingkat serapan yang relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana desa belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Padahal, belanja pembangunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, tingkat realisasi belanja merupakan yang terendah dibandingkan bidang lainnya. Rendahnya serapan anggaran pada bidang ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBDes. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran orientasi kebijakan anggaran desa agar lebih berfokus pada belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis realisasi APBDes Desa Meunasah Mee tahun anggaran 2020–2023, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah desa belum sepenuhnya optimal. Meskipun rasio efektivitas pendapatan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, realisasi belanja masih menunjukkan ketimpangan antar bidang.

Dominasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa serta rendahnya realisasi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa orientasi penggunaan anggaran desa masih cenderung bersifat administratif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa secara berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan APBDes berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi anggaran. Selain itu, alokasi anggaran



perlu diarahkan secara lebih proporsional pada belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar APBDes dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik keuangan desa Indonesia. *Badan Pusat Statistik*.
- Fitriani, L. (2021). Desentralisasi fiskal desa dan implikasinya terhadap pembangunan lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–58.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi sektor publik. *Salemba Empat*.
- Hidayat, A. (2022). Efisiensi belanja desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Keuangan Publik*, 14(2), 101–115.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Pedoman pengelolaan keuangan desa. *Kemendes PDTT*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku saku dana desa. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.
- Kurniawan, D. (2023). Efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. *Journal of Public Sector Accounting*, 5(1), 22–36.
- Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. *UPP STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. *Andi*.
- Nurcholis, H. (2017). Pemerintahan desa: Unit pemerintahan paling depan. *Grasindo*.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prabowo, H. (2020). Good governance and village budgeting effectiveness. *Journal of Public Administration*, 12(3), 211–225.
- Putra, R., & Pratiwi, A. (2018). Analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 67–79.
- Rahayu, S. (2021). Analisis kinerja anggaran desa dalam perspektif efektivitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 89–103.
- Santoso, B. (2022). Public sector budgeting effectiveness in rural government. *Asian Public Finance Review*, 8(2), 134–149.
- Sari, N. P., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(2), 128–135.
- Siregar, B. (2018). Akuntansi pemerintahan. *UPP STIM YKPN*.
- Sujarwени, V. W. (2019). Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa. *Pustaka Baru Press*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliani, N. (2020). Budget effectiveness in village governance. *Public Finance Journal*, 6(1), 55–69.